

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Bawono, A. D. B. 2008. Keadilan Prosedural Dalam Hubungan Antara Budgetary Goal Characteristics Dan Kinerja Manajerial Pejabat Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 151-161.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivari-ate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hardiana A. Bawono. 2018. “Pengaruh Perubahan Pendapatan, Realisasi Dana Alokasi Khusus Dan Perubahan Pembiayaan Terhadap SILPA”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ida Ayu Gede Sutha Megasari, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
- Imam Ghozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Empat)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Izudin, H., Syaparudin., Dan M. Syamsudin. H. 2013. “Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No.1.
- Kamelia M. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor”. *Thesis*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kurniawan, A. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung. Alfabeta.

Kusnandar, dan D. Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Uni-versitas Indonesia*.

Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta, Erlangga.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ramadhan, M.F.A. 2015. "Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran dan Temuan Audit Terhadap SiLPA Pemerintah Daerah di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ratna I. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 18, No. 2 Juli Desember 2015.

Sugiantini, N.L.A. 2015. "Kecenderungan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal di Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume: 5. Nomor. 1 Tahun 2015.

Suharna, I. 2015. "Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 s.d. 2013". *Tesis*. Universitas Gajdah Mada. Yogyakarta.

Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

UU No 1 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Winarni, N.S. 2013. “Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kota Tarakan”. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.